



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 November 2017/Periodik - 2017)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BIMA
UNIT KERJA : DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : H. MAHFUD
2. Jabatan : KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
3. NHK : 159221

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 5200 m²/- m² di KAB BIMA, WARISAN Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 480 m²/100 m² di KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/180 m² di KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m²/- m² di KOTA BIMA, WARISAN Rp. 300.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/- m² di KAB BIMA, WARISAN Rp. 100.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 700 m²/- m² di KAB BIMA, WARISAN Rp. 100.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 1400 m²/- m² di KAB BIMA, WARISAN Rp. 75.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 1700 m²/- m² di KAB BIMA, WARISAN Rp. 125.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 1100 m²/- m² di KAB BIMA, WARISAN Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 220.000.000

1. MOBIL, HONDA JASS - Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOTOR, VARIO HONDA Tahun 2016, WARISAN Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HAMMER TRAIL Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. ----

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.470.000.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.470.000.000



Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **6 Juni 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.